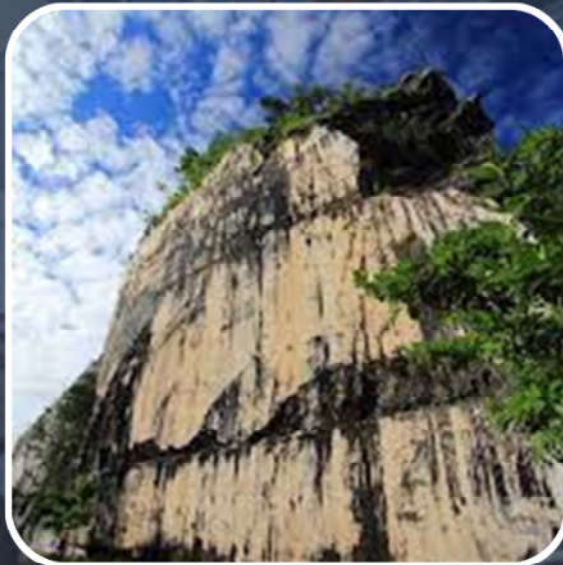
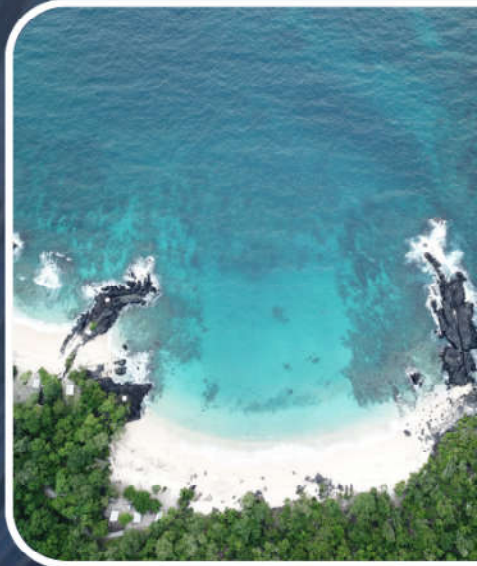




LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

TAHUN 2023

**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dapat diselesaikan. Sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dan penggerak utama bagi sektor lain dalam pembangunan Provinsi NTT periode 2018-2023. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT telah melakukan berbagai program dan kegiatan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah dengan konsep pembangunan Pariwisata Estate. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan untuk pengembangan pariwisata daerah melalui pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Atraksi, Amenitas, Akomodasi, Aksesibilitas dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan.

Selama Tahun Anggaran 2023, kami telah melakukan sejumlah kegiatan dalam 5 program sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berbagai program dan kegiatan secara garis besar meliputi kegiatan penunjang dan kegiatan utama. Kegiatan penunjang meliputi kegiatan perencanaan, evaluasi, keuangan dan urusan kepegawaian dan umum yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Sementara kegiatan utama dilaksanakan di setiap bidang seperti kegiatan pembangunan daya tarik destinasi wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif serta penguatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Fokus kegiatan pada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun pemahaman yang kuat akan pentingnya potensi lokal dalam mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta keterlibatan masyarakat untuk peningkatan ekonomi.

Terima kasih disampaikan untuk partisipasi dan dukungan semua staf dan berbagai pihak yang terlibat sehingga berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2023 dapat berjalan dengan baik. Semoga kegiatan yang dilakukan bermanfaat bagi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi NTT dan menjadi referensi dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Kupang, 15 Januari 2024





Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

JONI LIE ROHI LODO, S.H

Pembina Tk. I / IV b

NIP 196707171993031016

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Parekraf	
Fungsional Perencana Ahli Madya	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

I	Pendahuluan	1
1.1	Dasar Hukum	1
1.2	Visi dan Misi Kepala Daerah	2
1.3	Data Umum Perangkat Daerah	7
1.4	Realisasi Pendapatan Belanja dan pembiayaan.....	12
II	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	13
III	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	16
3.1	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	16
3.2	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	35
3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya	36
IV	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	39
4.1.	Urusan Pemerintahan yang ditugas Pembantuan	39
4.2.	Hambatan / Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....	40
V	Penutup	41

Lampiran

Lampiran 1 : Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Kepariwisataaan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pemnbangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 A tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi Kepala Daerah merujuk dan berpedoman pada visi RPJPD NTT 2005-2025 yang mengusung visi : **“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**, yang tertuang dalam Visi RPJMD NTT 2018-2023. Visi RPJMD 2018-2023 menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada kurun waktu lima tahun yang akan datang, yaitu :

“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Kebangkitan merupakan momentum yang menyatukan seluruh energi bangsa ke dalam satu semangat yang mempercepat pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Pembangunan bermakna sebagai kebangkitan nasional baru, sehingga BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas keluar dari situasi yang lama menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit merupakan sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi mau bekerja sama dan bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa ‘tidur panjang’ untuk bangun berjuang melepaskan diri dari berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, pengangguran, ketergantungan dan ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi melalui pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ditopang oleh lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan hidup gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 78 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Bangkit dan Sejahtera adalah hubungan sebab akibat yang mengada dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembangunan NTT menjadi bagian integral dari suatu *nation and character building*.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka disusun 5 Misi dan Misi yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT adalah Misi ke-2, yaitu:

Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)

NTT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional yang menghadirkan rangkaian keindahan (*ring of beauty*) atraksi alam dan budaya NTT yang otentik. Ditambah atraksi buatan yang didasarkan pada otentisitas NTT.

3. Kebijakan Strategis

Kebijakan Strategis yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Parekras Provinsi NTT tergambar dalam Misi ke – 2 sebagai berikut:

MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan pariwisata Sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan Pola Pendekatan Kawasan	1. Pembangunan perwilayahan destinasi <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan 'ring of beauty' melalui pengembangan Destinasi Pariwisata baru di 22 Kabupaten/Kota dalam konsep Pariwisata Estate yang berbasis masyarakat. Pengembangan daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan terutama Tradisional dan Alam. 2. Pembangunan daya tarik wisata <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui Promosi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Peningkatan Promosi yang dilakukan secara beragam melalui Media Elektronik dan Media Cetak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengembangan pemanfaatan Media Sosial. 3. Pembangunan infrastruktur pariwisata <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pembangunan sarana prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pariwisata.

		<p>4. Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat melalui kepariwisataan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengedukasi masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata tentang peran dan fungsi, manfaat pariwisata guna merangsang pemanfaatan peluang - peluang yang menguntungkan secara ekonomi. • Penetapan peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu Pelayanan Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan Wisata. • Pengelolaan Pariwisata yang berbasis masyarakat setempat. • Pemerataan arus wisata bagi semua daerah tujuan wisata yang ada di NTT. <p>5. Pembangunan SDM Pariwisata Peningkatan jumlah SDM di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>6. Pengembangan Investasi pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama antar penyelenggara pariwisata seperti Agen Biro Perjalanan, Pengusaha Jasa Akomodasi dan komponen – komponen terkait lainnya. • Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pengolahan secara profesional dan mutu pelayanan yang memadai.
	2. Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	<p>1. Penguatan value chain kepariwisataan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor hulu sebagai pemasok bahan baku bagi kebutuhan industri kepariwisataan. • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor antara (pengolahan) untuk meningkatkan nilai tambah. • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor hilir untuk meningkatkan nilai transaksi dengan wisatawan. • Pengembangan jaringan bisnis untuk menyatukan pelaku ekonomi (hulu-antara-hilir) sehingga terbentuk value chain kepariwisataan yang solid dan dinamis. <p>2. Peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan belanja wisatawan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah. • Pengembangan atraksi wisata interaktif untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan. • Peningkatan intensitas penyelenggaraan event kepariwisataan pada semua destinasi pariwisata. • Penerapan sistem pembayaran elektronik pada semua outlet kepariwisataan untuk mempermudah transaksi wisatawan.

Sumber: RPJMD Perubahan NTT 2018-2023

Selanjutnya Misi pembangunan pariwisata di NTT dikaitkan dengan upaya mewujudkan agenda pembangunan nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

Misi RPJMD NTT	Misi RPJPD 2005-2025	Misi RPJMN 2015-2019	Agenda Prioritas Nawacita
<p>Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>ring of beauty</i>)</p>	<p>Misi 4 Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan.</p>	<p>Misi 2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing</p> <p>Misi 3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan</p> <p>Misi 5 Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa</p>	<p>Nawacita 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p>

Sumber: RPJMD Perubahan NTT 2018-2023

Untuk mewujudkan Misi ke 2 tersebut, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja yang harus dicapai sampai tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel – tabel berikut.

Tabel 1. Indikator Makro Target RPJMD Provinsi NTT pada Tahun 2018-2023

Indikator Makro	Baseline (2019)	2021	2022	2023
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2	5,87 – 6,50	6,33 – 6,90	6,7 – 7,3
PDRB per kapita (Rp.jt)	19,5	20 - 23	23- 25	25- 27
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	65,23	65.54 – 67.00	67,35 – 69.00	70-71
Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21 – 19,63	19,35 – 16,15	15 - 12
Inflasi (%)	0,67	3 - 3,4	3 - 3,2	3 - 3,2
Prevelensi Stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10-12
Indeks Gini (poin)	0,36	0,35 – 0,34	0,34 - 0,33	0,34 - 0,32
Indeks Pembangunan Gender (poin)	92,72	94	95	95
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	3,2 – 2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5
Rasio PAD (%)	23,90	25,31	30,12	39,74
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO ₂ eq)	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)	44,93	63,91	71,47	80,94
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (poin)	60,37	65	69	71

Sumber: RPJMD Perubahan NTT 2018-2023

Tabel 2. Indikator untuk Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir (2023)
Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (<i>attraction, accessibility, accommodation, amenities, dan awareness</i>) dengan pola pendekatan kawasan	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	0,75	0,76	0,77	0,78	0,78
		Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB (%)	2,2	2,23	2,32	2,45	2,45
		Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%)	12,08	12,12	12,18	12,23	12,23
	Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)	2	4	6	8	8
		Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	4	4	4
		Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.165.378	1.378.453	1.634.144	1.634.144

Sumber: RPJMD Perubahan NTT 2018-2023

Tabel 3. Rencana Target dan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021-2023

Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	%	112,08	32,38	42,27	56,67	56,67
	Peningkatan Cakupan Desa Wisata pada Kawasan Pariwisata Estate	%	-	29,17	79,17	100	100
Program Pemasaran	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	112,08	32,38	42,27	56,67	56,67
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Hak Paten (HKI)	%	-	1,5	5	10	10
	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	%	-	93,75	93,75	100	100
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahliannya:						
	a. Tour operator	%	-	29,17	79,17	100	100
	b. Pemandu Wisata	%	-	29,17	79,17	100	100
	c. Pelaku Ekraf	%	-	29,17	79,17	100	100
	d. Restoran	%	-	29,17	79,17	100	100
	e. Perhotelan	%	-	29,17	79,17	100	100
	f. Pramuwisata	%	-	29,17	79,17	100	100
	g. Transportasi	%	-	29,17	79,17	100	100
	h. Informasi	%	-	29,17	79,17	100	100
	Peningkatan Cakupan POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)	%	-	29,17	79,17	100	100

Sumber: RPJMD Perubahan NTT 2018-2023

1.3. Data Umum Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif selama lima (5) tahun. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi amanat peraturan perundang-undangan, juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong dan mengawal Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama lima (5) tahun. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini adalah (1) Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing pariwisata dengan provinsi lain; (2) Investasi kepariwisataan belum berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat lokal; (3) Infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang belum memadai; (4) Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pembangunan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur.

1. Tupoksi dan Struktur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada unsur pelaksana bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tugas dan fungsi yang diberikan sebagai berikut :

- Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- Menyelenggarakan fungsi
 - Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

b. Struktur Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi NTT Nomor 21 Tahun 2021, yang secara struktur memiliki organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretaris, yang terdiri atas :
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Destinasi Pariwisata
 - Kelompok Jabatan Fungsional

- Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT berjumlah 79 orang dan didukung tenaga kontrak sebanyak 31 orang. Gambaran selanjutnya dapat dilihat pada beberapa tabel sebagai berikut :

Tabel. 4. Komposisi Pegawai berdasarkan Gol/Ruang Keadaan 31 Desember 2023

NO	GOL/RUANG	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1	Gol. IV/e	-	-	-	
	Gol. IV/d	-	-	-	
	Gol. IV/c	1	-	1	
	Gol. IV/b	5	-	5	
	Gol. IV/a	1	1	2	
	Jumlah Gol. IV	7	1	8	10,13 %
2	Gol. III/d	10	12	22	
	Gol. III/c	6	3	9	
	Gol. III/b	5	7	12	
	Gol. III/a	8	7	15	
	Jumlah Gol. III	29	29	58	73,42 %
3	Gol. II/d	2	2	4	
	Gol. II/c	4	-	4	
	Gol. II/b	4	-	4	
	Gol. II/a	1	-	1	
	Jumlah Gol. II	11	2	13	16,45 %
4	Gol. I/d	-	-	-	
	Gol. I/c	-	-	-	
	Gol. I/b	-	-	-	
	Gol. I/a	-	-	-	
	Jumlah Gol. I	0	0	0	0%
	TOTAL (1+2+3+4)	47	32	79	100%

Dari tampilan tabel di atas terlihat bahwa komposisi PNS Pria lebih banyak (47 org = 59,49 %) bila dibandingkan dengan PNS Wanita (32 org = 40,51 %).

Tabel. 5. Komposisi PNS berdasarkan Agama Keadaan 31 Desember 2023

NO	AGAMA	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Protestan	27	22	49	62,02 %
2.	Katholik	17	9	26	32,91 %
3.	Islam	3	1	4	5,07 %
4.	Hindu	-	-	-	0 %
5.	Budha	-	-	-	0 %
	TOTAL	47	32	79	100%

Tabel. 6. Komposisi PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Keadaan 31 Desember 2023

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH JABATAN	JABATAN TERISI			KET
			L	P	JLH	
1.	Eselon II	1	1	-	1	
2.	Eselon III	5	5	-	5	
3.	Eselon IV	1	1	-	1	
4.	Pejabat Fungsional Tertentu	10	5	5	10	
	TOTAL	17	12	5	17	

Tabel. 7 Komposisi PNS pada Bidang/Sekretariat Keadaan 31 Desember 2023

NO	SUBDIN/BAGIAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Sekretariat	23	8	31	39,24 %
2.	Bidang Destinasi Pariwisata	8	5	13	16,45 %
3.	Bidang Pemasaran Pariwisata	3	6	9	11,39 %
4.	Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8	7	15	18,99%
5.	Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5	6	11	13,93%
	TOTAL	47	32	79	100%

Tabel. 8 Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan 31 Desember 2023

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	S-3	1	-	1	1,27 %
2.	S-2	9	4	13	16,45 %
3.	S-1/D-IV	21	16	37	46,83 %
4.	Diploma/Sarjana Muda	5	9	14	17,72 %
5.	SLTA	9	3	12	15,19 %
6.	SLTP	2	-	2	2,53 %
7.	SD	1	-	1	1,22%
	TOTAL	47	32	79	100%

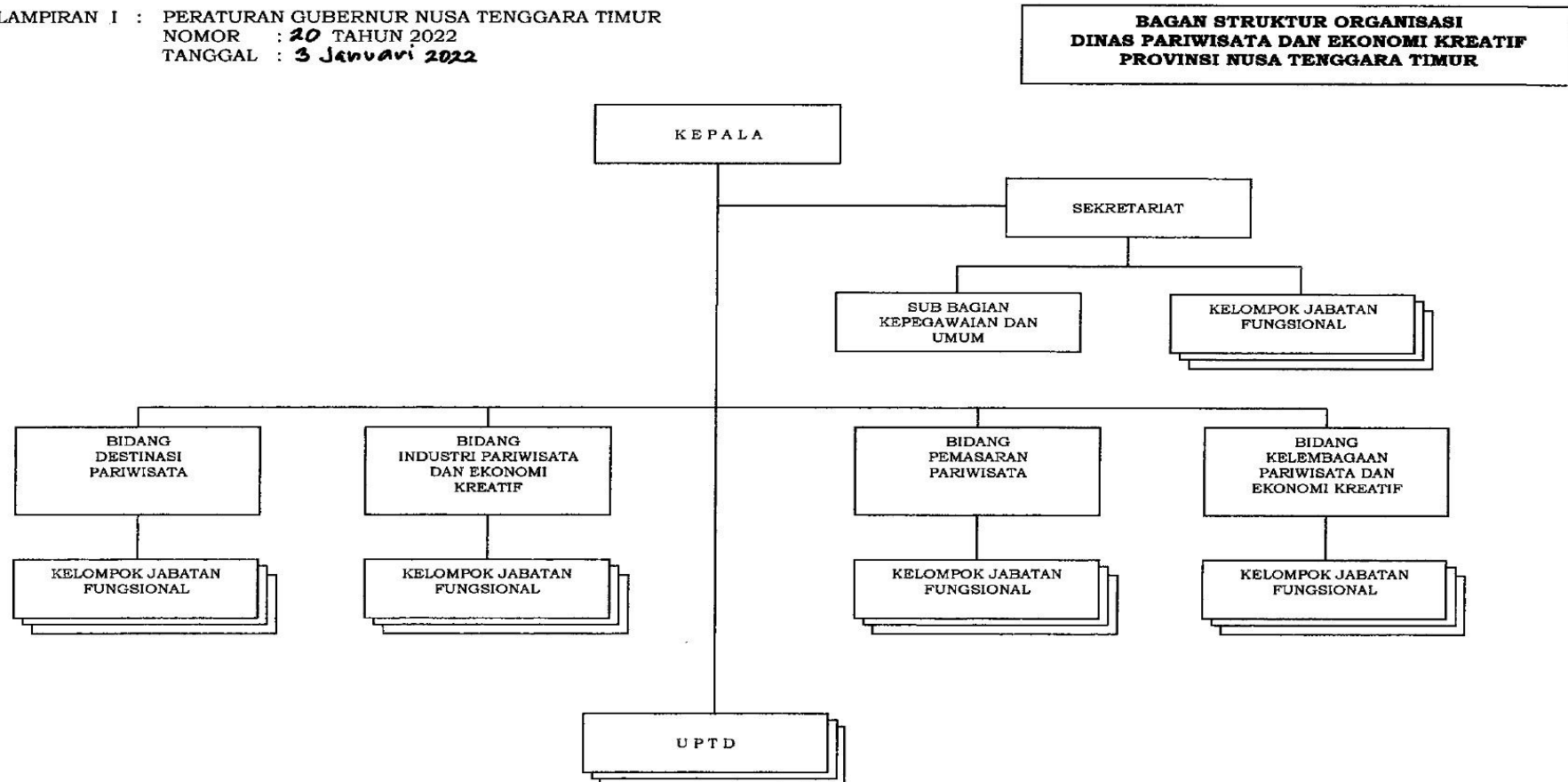
Selain Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat pegawai honorer/tenaga kontrak yang berjumlah 31 orang, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 9 Komposisi Tenaga Kontrak (TK) 31 Desember 2023

No	Jabatan Tenaga Kontrak	L	P	Jumlah	Ket
1	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18	13	31	100 %

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
Keadaan 31 Desember 2023

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : **20** TAHUN 2022
 TANGGAL : **3 Januari 2022**



b. Aset Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, selain memiliki Sumber Daya Manusia, juga memiliki Sumber Daya berupa aset (Barang Bergerak dan Tak Bergerak)

Tabel. 10 Kondisi Aset Keadaan 31 Desember 2023

NO	ASET	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
A	Barang Bergerak			
1.	Kendaraan Roda 4	2 unit	Kota Kupang	Baik
2.	Komputer (PC dan Laptop)	52 unit	Kota Kupang	Baik
3.	Printer	18 unit	Kota Kupang	Baik
4.	Infocus/LCD	3 unit	Kota Kupang	Baik
5.	GPS	4 unit	Kota Kupang	Baik
6.	Kamera	4 unit	Kota Kupang	Baik
7.	Drone	3 unit	Kota Kupang	Baik
8.	AC	16 unit	Kota Kupang	Baik (2 unit baru di tahun 2022)
9.	Motor Sampah	1 unit	Kota Kupang	Rusak
10.	Kursi	20 unit	Kota Kupang	Baik
	Kursi Lipat (fernekel)	20 unit	Kota Kupang	Baik
11.	Meja	78 unit	Kota Kupang	Baik
12.	Lemari	25 unit	Kota Kupang	Baik
	Rak Arsip	2 unit	Kota Kupang	Baik
13.	Handycam	4 unit	Kota Kupang	Baik
14.	TV	3 unit	Kota Kupang	Baik
15.	Genset	1 unit	Kota Kupang	Baik
16.	Mesin Sidik Jari	1 unit	Kota Kupang	Baik
17.	Peralatan Rumah Tangga (kain gorden, tempat sampah, sapu,dll)	1 paket	Kota Kupang	Baik
18.	Speaker Aktive	1 unit	Kota Kupang	Baik. (2022)
B	Barang Tidak Bergerak			
1.	Tanah kantor	1 kapling – 10.000 m2	Kota Kupang	Baik – ada SHM
2.	Tanah utk lokasi wisata	5 kapling	Kota Kupang, pantai Pede Labuan bajo dan Moni Kab. Ende	Baik – ada SHM
3.	Tanah utk perumahan dinas	6 kapling	Kota Kupang	Baik – ada SHM
4.	Gedung Kantor	3 unit	Kota Kupang (Kayu Putih)	Baik
5.	Gedung kantor	1 unit	Labuan Bajo	Baik
6.	Gudang kantor	1 unit	Kota Kupang (Kayu Putih)	Baik
7.	Rumah Dinas	1 unit	Kota Kupang (Kayu Putih)	Baik
8.	Rumah Dinas / Mess	6 unit	Kota Kupang (BTN Kolhua)	Baik
9.	Bangunan utk wisata (penginapan, lopo)	4 kawasan	Lasiana dan Gua Monyet Kota Kupang, Moni dan pantai Ria Kab. Ende.	Baik

Sumber: Dinas Parekraf NTT,2023

1.4. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

1. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Tabel. 11 Realisasi Keuangan Menurut Jenis Pendapatan

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET 2023	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	KETERANGAN
A	Retribusi Daerah	600.000.000	500.000.000	469.262.880	94 %
1.	Retribusi Pemakaian/Penyewaan Kekayaan Daerah			234.826.880	
	a. Sewa Rumah Dinas (7 unit)				
	b. Sewa Kantin Pariwisata				
	c. Sewa Pusat Kuliner dan Cenderamata				
	d. Fasilitas Pariwisata Estate				
	e. Sewa Rumah Ekraf Victory				
	f. Sewa Lopo				
2.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga			234.436.000	
	a. Kawasan Wisata Kampung Seni Flobamorata (Gua Monyet)			35.988.000	
	b. Kawasan Pantai Lasiana			198.448.000	
B	Lain – Lain PAD yang Sah	40.000.000.000	2.350.599.967	-	0 %
	Rekapitulasi	40.600.000.000	2.850.599.967	469.262.880	16,46 %

Sumber: Dinas Parekraf NTT,2023

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT tahun 2023 sebesar Rp 8.324.156.279 atau 79,11 % dan ada sisa sebesar Rp 2.196.855.481 . Sisa anggaran cukup besar karena alokasi anggaran gaji dan tunjangan (khususnya tunjangan fungsional) dan program kegiatan di bidang yang sudah dialokasikan tidak dapat direalisasikan karena kondisi kas daerah terbatas. Realisasi Belanja menurut jenis belanja secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran 1.

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi menurut jenis pembiayaan tidak ada di Dinas Parekraf NTT.

2. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT pada tahun anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 11.249.157.790 sesuai DPA SKPD Dinas Parekraf Provinsi NTT Nomor DPA/A.2/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang semuanya merupakan Belanja Operasi sebesar Rp 11.249.157.790 Sementara untuk Pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp 40.600.000.000 yang terdiri dari retribusi daerah Rp 600.000.000 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 40.000.000.000.

Dalam perjalanan terdapat penyesuaian pendapatan dengan konstruksi seperti tabel

Tabel. 12. Anggaran Pendapatan APBD TA 2023

No	Uraian	DPA Awal (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Keterangan
1.	Rencana Pendapatan	40.600.000.000	2.850.599.967	
	- Retribusi Daerah	600.000.000	500.000.000	
	- Lain-Lain PAD yang Sah	40.000.000.000	2.350.599.967	

Tabel. 13. Anggaran Belanja APBD TA 2023 dan Perubahannya

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Lokasi	Uraian Keluaran Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.249.157.790	8.489.418.160		Penyusunan dokumen perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan, evaluasi kinerja perangkat daerah
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.143.000	95.093.000		
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.240.000	12.240.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.526.000	14.526.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.952.000	5.952.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.160.000	15.110.000	Kota Kupang	
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.265.000	47.265.000	Kota Kupang	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.705.009.630	6.871.285.000		Penyediaan gaji, tata usaha dan pengelolaan keuangan, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, dokumen pemeriksaan.
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.603.669.630	6.765.937.000	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.280.000	62.280.000	Kota Kupang	
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9.300.000	9.300.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.300.000	13.308.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.300.000	9.300.000	Kota Kupang	
	▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.160.000	11.160.000	Kota Kupang	

	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.840.000	25.800.000		Data kepegawaian dan system informasi kepegawaian
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.920.000	12.900.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.920.000	12.900.000	Kota Kupang	
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.177.000	252.585.400		Penyediaan material dan barang kantor, makan-minum tamu, konsultasi koordinasi SKPD dan kabupaten/kota
	▪ Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	30.415.000	Kota Kupang	
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	23.064.000	28.830.000	Kota Kupang	
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.113.000	193.340.400	Jakarta, Jabar	
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.148.777.96	1.153.024.760		komunikasi, listrik, air kantor, pelayanan umum kantor
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.230.000	144.890.000	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	998.547.960	1.008.134.760	Kota Kupang	
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.580.000	91.630.000		Jasa pemeliharaan kendaraan, mesin dan bangunan lainnya
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000	61.630.000	Kota Kupang	
	▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.580.000	30.000.000	Kota Kupang	
2	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	357.863.700	446.134.000		
	a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	357.863.700	446.134.000		
	▪ Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	91.000.000	91.000.000	Kota Kupang	Penyusunan Master Plan Kampung Seni Flobamorata Kupang
	▪ Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	65.011.500	153.281.800	Kupang, Sumba Timur TTS, Rote, Ende, Alor	Monitoring pengelolaan fasilitas Homestay di 5 PE
	▪ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	201.852.200	201.852.200	Kab. Ende, TTS, Sikka, Sumba Barat	Workshop pengembangan seni budaya, pentas musik dan tari, dukungan dana kegiatan, pentas musik dan tari
3.	Program Pemasaran Pariwisata	1.093.063.700	949.756.800		
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.093.063.700	949.756.800		
	▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	61.063.700	28.063.700	Kota Kupang,	Wallpaper di TIC Bandara El Tari Kupang
	▪ Fasilitas Kegiatan Pemasaran	932.000.000	821.693.100	Semau dan	Festival Kupang dan

	Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			Kab. TTU	Pacuan Kuda
	▪ Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	100.000.000	Kota Kupang	Pameran pontesi pariwisata,
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	371.428.620	371.428.620		
	a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	371.428.620	371.428.620		
	▪ Fasilitasi Kekayaan Intelektual	371.428.620	371.428.620	Kab. Belu, Flotim. Mabar, Nagekeo, TTU, Kota Kupang, Jakarta	Fasilitasi HKI, Pelatihan digital marketing., Perda Ekraf
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	264.274.180	264.274.180		
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	178.176.180	178.176.180		
	▪ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	41.785..180	41.785..180	Kab. Belu, Malaka, TTS , Kupang	Penguatan Pokdarwis
	▪ Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	136.391.000	136.391.000	Kota Kupang,	Sertifikasi pekerja sektor restoran 50 orang
	b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	86.098.000	86.098.000		Sertifikasi kompetensi tenaga Barista 15 orang
	▪ Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	86.098.000	86.098.000	Kota Kupang,	
	Jumlah	11.249.157.790	10.521.011.760		

Sumber: hasil olahan,2023

3. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Parekraf Provinsi NTT melaksanakan tugas yang terkait dengan urusan pilihan sektor pariwisata yang terdiri dari 5 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Evaluasi capaian kinerja dilakukan berdasarkan target pelaksanaan RPJMD Perubahan NTT 2018-2023 periode Tahun 2023 sampai kondisi Bulan Desember 2023. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat ada tabel 14 dan lampiran 2.

Tabel. 14. Realisasi Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.489.418.160	7.948.882.094	541.336.066	
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.093.000	94.656.600	436.400	
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.240.000	12.140.600	99.400	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.526.000	14.526.000	-	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.952.000	5.900.000	52.000	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.110.000	14.825.000	285.000	
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.265.000	47.265.000	-	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.871.285.000	6.375.168.652	496.116.348	
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.765.937.000	6.269.921.852	496.015.148	Sebagian besar sekitar 200 juta merupakan tunjangan fungsional tertentu yg tdk dapat dibayarkan karena beum ada regulasi yg mendukung
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.280.000	62.226.800	53.200	
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9.300.000	9.291.000	9.000	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.308.000	13.305.000	3.000	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.300.000	9.300.000	-	
	▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.160.000	11.124.000	36.000	
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.800.000	25.733.000	67.000	
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.900.000	12.863.000	36.000	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.900.000	12.870.000	30.000	
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.585.400	250.571.223	2.014.177	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Bahan/Material ▪ Fasilitas Kunjungan Tamu ▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	30.415.000 28.830.000 193.340.400	28.960.350 28.750.808 192.860.065	1.454.650 79.192 480.335	
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.153.024.760	1.116.008.711	37.016.049	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	144.890.000 1.008.134.760	143.193.444 972.815.267	1.696.556 35.319.493	
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.630.000	85.943.908	5.686.092	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	61.630.000 30.000.000	55.975.108 29.968.800	5.654.892 31.200	
2	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	446.134.000	152.311.800	293.822.200	
	a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	446.134.000	152.311.800	293.822.200	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi ▪ Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi ▪ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 	91.000.000 153.281.800 201.852.200	90.500.000 61.811.800 -	500.000 91.470.000 201.852.200	Penyusunan Master Plan KSF secara swakelola tipe 2 kerjasama dgn FST Undana Kegiatan Apraisal dilakukan di PE Pramadita TTS dan Wolwal Alor
3.	Program Pemasaran Pariwisata	949.756.800	60.000.000	889.756.800	
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	949.756.800	60.000.000	889.756.800	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri ▪ Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri ▪ Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 	28.063.700 821.693.100 100.000.000	- 60.000.000 -	28.063.700 761.693.100 100.000.000	Dukungan untuk kegiatan ASEAN Summit 2023
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	371.428.620	163.762.385	207.666.235	
	a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	371.428.620	163.762.385	207.666.235	

	▪ Fasilitas Kekayaan Intelektual	371.428.620	163.762.385	207.666.235	Kabupaten Flotim, Mabar, Nagekeo dan Kota Kupang untuk Perda Ekraf
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	264.274.180	-	264.274.180	
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	178.176.180	-	178.176.180	
	▪ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	41.785.180	-	41.785.180	
	▪ Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	136.391.000	-	136.391.000	
	b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	86.098.000		86.098.000	
	▪ Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	86.098.000	-	86.098.000	
	Jumlah	10.521.011.760	8.324.156.279	2.196.855.481	

Sumber: hasil olahan, 2024

3.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Selanjutnya evaluasi capaian kinerja dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dengan Gubernur NTT dan perubahannya.

Tabel 15. Target Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2023 sesuai Sasaran Strategis Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui Pemenuhan Unsur 5A di Kawasan Pariwisata Estate	Persentase Pemenuhan unsur 5A di Kawasan Pariwisata Estate	7 PE	80 %	71,43 %	Lama tinggal kunjungan wisata 2,01 hari	Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover)	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty)
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per tahun	10.390 orang	50.000 orang	319.573 orang	Jumlah wisatawan nusantara 1.305.318 dan mancanegara. 319.573 (total 1.624.891 wisatawan)		
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara per tahun	647.880 orang	600.000 orang	1.305.318 orang			
2	Meningkatkan sumbangan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Persentase pertumbuhan jumlah UMKM baru bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pariwisata	6 %	8 %	25,45 %	Share lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB		

	Estate					mencapai 0,69 % (data sementara Triwulan 3 BPS NTT 2023)		
	Lama Tinggal Wisatawan	2,73 Hari	4 Hari	2,01 hari				
	Peningkatan Retribusi dari hasil Pengelolaan Aset (Rupiah)	124.194.000	2.850.599.967	469.262.880				

Sumber: hasil olahan, 2024

Tabel 16. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja 2023 sesuai Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI
A					
1.	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui Pemenuhan Unsur 5A Pariwisata di Kawasan Pariwisata Estate	Persentase Pemenuhan unsur 5A di Kawasan Pariwisata Estate	7 PE	80 persen	71,43 Persen
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per tahun	10.390 orang	100.000 orang	319.573 orang
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara per tahun	647.880 orang	800.000 orang	1.305.318 orang
2.	Meningkatkan sumbangan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Persentase pertumbuhan jumlah UMKM baru bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pariwisata Estate	6 persen	8 persen	25,45 persen
		Lama Tinggal Wisatawan	2,73 Hari	4 Hari	Rata – rata 2,01 hari
		Peningkatan Retribusi dari hasil Pengelolaan Aset (Rupiah)	124.194.000	2.850.599.967	469.262.880

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
B					
1.	APBD				
	a). Belanja (program)	10.521.011.760	Minimal 85 %	78,45 %	Tidak tercapai
	▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.489.418.160	90 %	93,63 %	Tercapai
	▪ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	446.134.000	90 %	34,14 %	Tidak tercapai
	▪ Program Pemasaran Pariwisata	949.756.800	90 %	6,32 %	Tidak tercapai
	▪ Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	371.428.620	90 %	44,09 %	Tidak tercapai
	▪ Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	264.274.180	90 %	0 %	Tidak tercapai
	b). Pendapatan	2.850.599.967	Minimal 90 %	16,46 %	Tidak tercapai
2.	APBN				
	Tugas Pembantuan	1.385.000.000	Minimal 90 %	98,88 %	Tercapai

	▪ Program Kepariwisata dan Ekraf	1.275.000.000			
	▪ Program Dukungan Manajemen	110.000.000			

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
C	Belanja pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi E-Purchasing		Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	0,15 %	Tidak tercapai
D.	Penyampaian LKPD, LPPD, dan LKIP paling lambat tanggal 28 Februari 2023;		28 Februari 2023	Terpenuhi	
E.	Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);		70-80	79,64	Data penilaian tahun 2021
F.	Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;		Minimal 90 %	98 %	
G.	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:				
	▪ TL temuan Tahun 2022		Admnistrasi 100 % dan Keuangan 80 %	Admnistrasi 90 % dan Keuangan 80 %	
	▪ TL temuan di bawah tahun 2022;		Admnistrasi 100 % dan Keuangan 80 %	Admnistrasi 85 % dan Keuangan 80 %	
H.	Jumlah Inovasi		Minimal 2 (dua) Inovasi	2 Inovasi	- Pesinden (Bidang Destinasi) - Singkat (Sekretariat)
I.	Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023		Paling lambat tanggal Januari 2023	Terlaksana pada Januari 2023	
J.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);		Minimal Kategori Baik (76,61-88,30); (76,61-88,30)	Baik (86,13)	
K.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Minimal Kategori Menuju Informatif		Minimal Kategori Menuju Informatif	Menuju Informatif	
L.	Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah minimal 1 (satu) Kerjasama		minimal 1 (satu) Kerjasama	4 (empat) kerjasama	- FST Undana - Pegadaian gaeri 24 RegionaI Denpasar - Promosi degan PT. Angkasa Pura I - Ilmu Administrasi Negara Undana

Sumber: Hasil olahan,2023

Pencapaian kinerja untuk bagian A telah diupayakan maksimal walaupun ada indikator yang belum mencapai target yaitu lama tinggal wisatawan dan pengelolaan aset. Indikator ini juga diperoleh berkat dukungan dan dibantu oleh instansi terkait lainnya baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten / kota termasuk dari pelaku pembangunan kepariwisataan. Untuk indikator pengelolaan aset masih jauh dari pencapaian sesuai target.

Pencapaian kinerja untuk bagian B dapat memenuhi target walaupun ada refokusing anggaran karena kondisi keuangan daerah yang kurang baik sebagai dampak tidak tercapainya target realisasi penerimaan daerah selama tahun 2023. Indikator yang tidak tercapai pada bagian ini adalah program dan kegiatan peningkatan kompetensi SDM Parekraf dan penerimaan dari pengelolaan aset.

3.1.2. Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Penyelenggaraan urusan pilihan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dilakukan melalui 5 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Realisasi keuangan sebesar Rp 8.324.156.279 atau 79,11 % Sisa dana Rp 2.196.855.481. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata

No	Kebijakan	Uraian Prog / Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	2	3	4	5	6	7
	1. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Input : Rp. 446.134.000	Input : Rp. 152.311.800 (34,14 %)	- Anggaran yang sdh tercantum dalam dokumen anggaran (DPA) tdk dapat dicairkan karena kondisi keuangan daerah. Pengajuan Permintaan GU ke Badan Keuangan Daerah utk beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan	- Peningkatan kerja kolaboratif dan mengefektifkan sumber pendanaan dari APBN dan pihak swasta - Kegiatan pada program yang tidak dilakukan dapat direncanakan untuk tahun anggaran berikutnya
	2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Input : Rp. 446.134.000	Input : Rp. 152.311.800 (34,14 %)		
	3. PP nomnor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata		Output : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi pada 7 kabupaten target mencapai 100 %	Output : Pengelolaan Destinasi Strategis Pariwisata Provinsi pada 3 kabupaten target mencapai 42,85 %	Kegiatan mencapai output tidak target	Lokasi target yang belum tercapai dapat dikerjakan tahun 2024
	4. Perda Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi NTT Tahun 2015-2025		Outcome : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi di 7 kabupaten target semakin baik untuk menarik kunjungan wisatawan	Outcome : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi di 3 kabupaten target semakin baik untuk menarik kunjungan wisatawan		

		a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Input : Rp. 91.000.000	Input : Rp. 91.000.000 (100 %)		
	5. Perda Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi NTT		Output : Tersedianya 1 dokumen perencanaan amenities.	Output : Tersedianya 1 dokumen perencanaan amenities (master plan Kampung Seni Flobamorata/Taman Gua Monyet)		
			Outcome : Pedoman pengembangan sarana dan prasarana dalam Kawasan strategis pariwisata provinsi	Outcome : Pedoman pengembangan sarana dan prasarana dalam Kawasan strategis pariwisata provinsi (Kampung Seni Flobamorata)		
		b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Input : Rp. 153.281.800	Input : Rp. 0 (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Bahan referensi untuk pelaksanaan kegiatan 2024
			Output : Tersedianya dokumen monev pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi di Kupang, TTS, Alor, Ende, Sumba Timur dan Rote Ndao (5 Dokumen)	Output :		
			Outcome : Bahan Perencanaan dan Pengembangan Lanjutan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi di 5 Lokasi	Outcome :		

		c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Input : Rp. 201.852.200	Input : Rp. 0 (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Bahan referensi untuk pelaksanaan kegiatan 2024
			Output : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi sebanyak 4 lokasi di Ende,Sikka,TTS, Sumba Barat	Output :		
			Outcome : Peningkatan kapasitas SDM masyarakat di Kawasan strategis pariwisata provinsi di 4 lokasi	Outcome :		
		2. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Input : Rp. 949.756.800	Input : Rp. 60.000.000 (6,32 %)	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran yang sdh tercantum dalam dokumen anggaran (DPA) tdk dapat dicairkan karena kondisi keuangan daerah. Pengajuan Permintaan GU ke Badan Keuangan Daerah utk beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kerja kolaboratif dan mengefektifkan sumber pendanaan dari APBN dan pihak swasta - Kegiatan pada program yang tidak dilakukan dapat direncanakan untuk tahun anggaran berikutnya

		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Input : Rp. 949.756.800	Input : Rp. 60.000.000 (6,32 %)		
			Output : Tersedia pemasaran dan promosi pariwisata pada daya tarik wisata, destinasi dan kawasan Pariwisata Provinsi Sebanyak 4 lokasi	Output : Tersedianya pemasaran dan promosi pariwisata di destinasi wisata di 1 lokasi (kota Labuan Bajo)		Dukungan kegiatan ASEAB Summit 2023
			Outcome : Adanya peningkatan kunjungan wisatawan di Destinasi wisata yang menjadi lokasi kegiatan / event	Outcome : Adanya promosi untuk peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Kupang		
		a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Input : Rp. 28.063.700	Input : Rp. 0 (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Kegiatan dapat direncanakan tahun 2024
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri . 1 dokumen. Wallpaper di TIC Bandara El Tari	Output :		
			Outcome : Keterbukaan informasi dan layanan informasi yang baik bagi wisatawan	Outcome : Akses informasi bagi wisatawan di Kawasan bandara El Tari Kupang		
		b. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Input : Rp. 821.693.100	Input : Rp. 0 (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Kegiatan dapat direncanakan tahun 2024

			Output : Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Semau Festival) dan dukungan ASEAN Summit 2023 dan Pacuan Kuda	Output : Tidak ada		
			Outcome : Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Kawasan pariwisata strategis provinsi	Outcome : tidak ada		
		c. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Input : Rp. 100.000.000	Input : Rp. 0 (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Kegiatan dapat direncanakan tahun 2024
			Output : Penyelenggaraan Kerjasama promosi	Output : Pameran Potensi Pariwisata		
			Outcome: Pengembangan Kerjasama promosi dan kemitraan	Outcome:		

		3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Input : Rp. 371.428.620	Input : Rp. 163.762.385 (44,09 %)	Anggaran yang sdh tercantum dalam dokumen anggaran (DPA) tdk dapat dicairkan karena kondisi keuangan daerah. Pengajuan Permintaan GU ke Badan Keuangan Daerah utk beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan	- Peningkatan kerja kolaboratif dan mengefektifkan sumber pendanaan dari APBN dan pihak swasta - Kegiatan pada program yang tidak dilakukan dapat direncanakan untuk tahun anggaran berikutnya
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Input : Rp. 371.428.620	Input : Rp. 163.762.385 (44,09 %)		
			Output: Pengembangan ekosistem ekraf melalui perlindungan HKI produk Ekraf di 11 kabupaten	Output: Pengembangan ekosistem ekraf melalui perlindungan HKI produk Ekraf di 3 kabupaten Flotim, Nagekeo, Mabar		
			Outcome: Produk ekraf di 11 kabupaten sasaran mendapat perlindungan HKI	Outcome: Produk ekraf di 3 kabupaten sasaran mendapat perlindungan HKI		
		a. Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Input : Rp. 371.428.620	Input : Rp. 163.762.385 (43,93%)		
			Output: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebanyak 3 dokumen	Output: Dokumen hasil fasilitasi Kekayaan intelektual sebanyak 1 dokumen yaitu Perda Ekraf		

			Outcome: Produk Ekraf NTT mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual	Outcome: Produk Ekraf NTT mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual		
		4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Input : Rp. 264.274.180	Input : Rp. 0 (0 %)	Anggaran yang sdh tercantum dalam dokumen anggaran (DPA) tdk dapat dicairkan karena kondisi keuangan daerah. Pengajuan Permintaan GU ke Badan Keuangan Daerah utk semua kegiatan tidak dapat direalisasikan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kerja kolaboratif dan mengefektifkan sumber pendanaan dari APBN dan pihak swasta - Kegiatan pada program yang tidak dilakukan dapat direncanakan untuk tahun anggaran berikutnya
		4.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Input : Rp. 178.176.189	Input : Rp. 0 (0 %)	Kegiatan tidak dilaksanakan	Kegiatan dialihkan tahun berikutnya
			Output: Peningkatan kapasitas SDM Parekraf sebanyak 85 orang di Kupang, TTS dan Kab.Kupang	Output:		
			Outcome: SDM Parekraf di NTT mendapatkan peningkatan kapasitas dan keahlian dalam pengelolaan destinasi wisata di NTT (khususnya Kupang, TTS dan Kabupaten Kupang)	Outcome: -		

		a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Input : Rp. 41,785.180	Input : Rp. 0 (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Kegiatan dialihkan tahun berikutnya
			Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Penguatan Pokdarwis). 22 orang di TTS dan Kab. Kupang	Output:		
			Outcome: Adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata di TTS dan Kab. Kupang	Outcome:		
		b. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Input : Rp. 136.391.000	Input : Rp. - (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Kegiatan dialihkan tahun berikutnya
			Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sub Sektor Restoran). 50 orang. Di Kupang	Output: -		
			Outcome: Penambahan SDM bersertifikat di bidang pariwisata sub sector Restoran sebanyak 30 orang	Outcome:		

		4.2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Input : Rp. 86.098.000	Input : Rp. - (0 %)	Kegiatan tidak dilaksanakan	Kegiatan dialihkan tahun berikutnya
			Output: Peningkatan kapasitas SDM Ekraf sebanyak 15 orang	Output:		
			Outcome: Penambahan SDM bersertifikat di bidang ekonomi kreatif sebanyak 15 orang	Outcome: -		
		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Input : Rp. 86.098.000	Input : Rp. - (0 %)	Kegiatan tdk dilaksanakan karena pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah	Kegiatan dialihkan tahun berikutnya
			Output: Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif (Sektor Barista) sebanyak 15 orang di Kupang	Output:		
			Outcome: Peningkatan kompetensi Barista untuk usaha Ekraf	Outcome:		

Sumber: hasil olahan,2024

Disamping kegiatan – kegiatan yang terprogram dan teranggarkan, Dinas Parekraf Provinsi NTT juga dalam tahun 2023 melaksanakan berbagai kegiatan baik dalam bentuk inovasi kegiatan maupun dalam kerangka membangun kemitraan khususnya dalam upaya membangkitkan dan menggairahkan kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Bentuk – bentuk kegiatan tersebut secara antara lain:

a. Kemitraan

Membangun kemitraan dan jejaring dengan pelaku pariwisata dalam skema pentahelik seperti kerjasama memanfaatkan Pantai Wisata Lasiana. Tercatat sebanyak 4 (empat) kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak seperti dengan FST Undana Kupang untuk Kegiatan Penyusunan Master Plan Kampung Seni Flobamorata Kupang (Swakelola Tipe 2), Kerjasama dengan Pegadaian Galeri 24 Regional Denpasar (Distro Kupang) untuk dukungan branding di Kawasan Pantai Lasiana dan Kerjasama untuk promosi dengan PT. Angkasa Pura I Kupang, PT. Angkasa Pura I Kupang dan Prodi Ilmu Administrasi Negara Undana terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

b. Inovasi

Inovasi yang telah dilakukan selama tahun 2023 sebanyak 2 inovasi yaitu Pedoman Indentikasi Awal Daya Tarik Wisata atau Pesinden yang dikembangkan Bidang Destinasi dan Aplilasi system informasi Kenaikan Pangkat (Singkat) oleh Sekretariat.

c. Penilaian AKIP

Pelaksanaan SAKIP yang sudah dinilai tahun 2021 adalah 79,64 dengan Kategori BB, sementara untuk tahun 2022 masih menunggu hasil penilaian yang dikeluarkan Biro Organisasi.

d. Pelaksanaan Kegiatan Survelensi ISO 9001 2015

Kegiatan Survelensi dilakukan tahun 2023 seperti kegiatan survelensi tahun 2022 lalu untuk memastikan pelaksanaan ISO meliputi 27 item yang dipenuhi dan sudah mendapat sertifikasi ISO 9001 2015 tanggal 13 Desember 2021 sesuai SK Gubernur NTT Nomor 423/KEP/HK/2021. Sertifikat Nomor SZT. 2021.SB.2.0.440.

e. Pengelolaan Website Dinas

Website Dinas Parekraf NTT adalah www.parekrafntt.id yang berisi informasi kegiatan yang dilakukan dinas, foto dan video pendek destinasi wisata dan juga artikel opini terkait kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Pengelolaan dilakukan sesuai SK Kepala Dinas Parekraf NTT Nomor 047/01/PAREKRAF1.3?I/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pembantuan Tim Pengelola Website dan media Sosial pada Dinas Parekraf Provinsi NTT.

Jumlah pengunjung selama tahun 2023 sebanyak 7.290, yang mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebanyak 9.522 kunjungan dan tahun 2021 sebanyak 8.645 kunjungan. Rata-rata kunjungan setiap bulan tahun 2023 sekitar 600 pengunjung sementara tahun 2022 lalu sekitar 750 pengunjung. Jumlah artikel yang dimuat dalam web site tahun 2023 sebanyak 32 artikel dan tahun 2022 lalu sebanyak 45 artikel baik berita maupun opini. Namun ada tambahan informasi pada menu Wisata Alam sebanyak 110 informasi daya tarik wisata alam hasil kegiatan penyusunan narasi wisata yang dilakukan sebanyak 60 ASN di Dinas Parekraf NTT.

f. Pengelolaan Pariwisata Estate

Kegiatan pengelolaan Pariwisata Estate dilakukan dalam bentuk membangun tata kelola agar operasional PE di 6 lokasi dapat berjalan dengan baik. Langkah awal dilakukan

dengan penyelesaian aspek legalitas lahan khususnya di 5 lokasi PE yaitu PE Liman Kabupaten Kupang, PE Fatumnasi Kabupaten TTS, PE Wolwal Kabupaten Alor, PE Praimadita Kabupaten Sumba Timur dan PE Mulut Seribu Kabupaten Rote Ndao. Kegiatan penilaian aset / Apraisal yang baru dilakukan untuk 3 lokasi PE tahun 2023 (PE Fatumnasi, Wolwal, Praimadita) dalam rangka peningkatan PAD. Untuk pengelolaan kawasan PE, mengingat masyarakat setempat perlu disiapkan dan ditingkatkan kualitasnya maka dilakukan kerjasama dengan pihak swasta yang profesional agar dapat mengelola dengan melibatkan masyarakat setempat. Tercatat sudah ada 5 pengelolaan dengan pihak swasta dan atau masyarakat di Kawasan PE selain PE Lamalera Kabupaten Lembata yang sudah dihibahkan kepada masyarakat setempat untuk dikelola.

g. Pengelolaan Aset untuk Penerimaan Daerah

Pengelolaan asset terdiri dari aset kekayaan daerah dari 5 (lima) unit rumah dinas dan kantin yang berada di halaman kantor Dinas Parekraf NTT. Kemudian terdapat aset wisata yang dikelola yaitu Pantai Wisata Lasiana dan Kampung Seni Flobamorata Kupang (eks Taman Gua Monyet). Sejak tahun 2021 sudah ada upaya peningkatan penerimaan dari pengelolaan PE dan sudah berkontribusi. Namun pengelolaan aset ini belum maksimal dilakukan karena dari target penerimaan yang dibebankan sebesar Rp 2.850.599.967 hanya menghasilkan pendapatan sebesar Rp 469.262.880 atau 16,46 %.

h. Kegiatan Perijinan Usaha Parekraf berbasis Resiko (OSS RBA)

Selama tahun 2023, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan kegiatan perijinan OSS usaha Parekraf berbasis resiko. Total permohonan perijinan OSS usaha pariwisata sejak Januari – Desember 2023 sebanyak 80 permohonan yang dilayani dalam bentuk pemberian rekomendasi teknis untuk verifikasi dalam aplikasi OSS. Dari 80 permohonan tersebut sebanyak telah dikelaurkan 44 Rekomendasi teknis untuk proses ijin, 11 rekomendasi teknis dengan catatan perbaikan dan 21 rekomendasi teknis dengan catatan penolakan. Rekomendasi teknis ini menjadi dasar verifikasi dalam aplikasi OSS RBA Dinas Parekraf NTT yang selanjutnya menjadi dasar pemberian ijin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi NTT.

3.1.3. Analisis Kesesuaian Pencapaian Kinerja

Secara garis besar Dinas Parekraf Provinsi NTT telah berupaya untuk memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Untuk penganggaran sudah berupaya mengakomodir kebutuhan pencapaian kinerja namun karena masih adanya kendala kondisi keuangan daerah sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilakukan. Indikator kinerja tersebut adalah Indikator Capaian Kinerja sesuai RPJMD Perubahan NTT 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Perubahan yang ada dalam Perjanjian Kinerja. Untuk indikator pada RPJMD Perubahan ada dapat tujuh indikator yang ditetapkan dalam 4 Program. Sementara Indikator Kinerja Utama (IKU) ada 5 indikator.

Tabel 18. Kondisi Capaian Kinerja Dinas Parekraf NTT Dalam RPJMD Perubahan NTT 2018-2023

No	Program/Indikator	Kondisi awal (2019)	Kondisi Kinerja Tahun 2023		Kondisi Akhir (2023)
			Target	Realisasi	
1.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
	a. Presentasi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	-	56,67 %	95,43 %	56,67 %
	b. Peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan Pariwisata Estate	-	100 %	87,50 %	100 %
2.	Pemasaran Pariwisata				
	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	112,08 %	56,67%	36,64 %	56,67 %
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI				
	a. Cakupan produk sub sektor ekraf yang mendapat hak paten (HAKI)	-	10 %	53,12 %	10 %
	b. Cakupan produk sub sektor ekraf yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	-	100 %	68,74%	100 %
4.	Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	a. Peningkatan cakupan ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut keahlian:				
	- Tour operator	-	100 %	12,50 %	100 %
	- Pemandu wisata	-	100 %	54,16%	100 %
	- Pelaku ekonomi kreatif	-	100 %	16,66%	100 %
	- Restoran	-	100 %	0	100 %
	- Perhotelan	-	100 %	0	100 %
	- Pramuwisata	-	100 %	54,16 %	100 %
	- Transportasi	-	100 %	0	100 %
	- Informasi	-	100 %	0	100 %
	b. Peningkatan cakupan Pokdarwis pada kawasan Pariwisata Estate (target 24 pokdarwis di tahun 2023)	-	100 %	79,17 %	100 %

Sumber: Olahan dari RPJMD Perubahan NTT 2018-2023

Tabel 19. Kondisi Capaian Indikator Kinerja Dinas Parekraf NTT Dalam Renstra Perubahan

No	Indikator	Kondisi awal (2019)	Kondisi Kinerja Tahun 2023		Kondisi Akhir (2023)
			Target	Realisasi	
1.	Persentasi Pertumbuhan UMKM Baru di Pariwisata Estate (%)	2	8	25,45 %	8
2.	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	2,01	4
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.534.1444	1.624.891	1.534.144
4.	Peningkatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Aset	563.092.000	1.000.000.000	469.262.880	1.000.000.000
5.	Sertifikasi Tenaga Kepariwisata	-	300	0	900

Sumber: Olahan Renstra Perubahan Dinas Parekraf NTT 2018-2023

No	Pencapaian	Analisis	Kesimpulan
1.	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di 7 kawasan PE yang sudah dibangun tercatat 417 wisatawan, sementara target 32 wisatawan setiap PE atau 224 wisatawan. Sementara tahun 2022 sebanyak 394 .	Target indikator 56,67 % tercapai dan melebihi yaitu 95,43 %
2.	Peningkatan Cakupan Desa Wisata pada Kawasan Pariwisata Estate	Sudah ada 21 desa wisata di Kawasan PE. Ada 5 desa pada Kawasan PE terbangun dan 16 desa wisata pada calon Kawasan PE	Target indikator 100 % dan mencapai 87,50 % atau belum mencapai target

3.	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	Target kunjungan wisatawan tahun 2023 adalah sekitar 1.534.144 wisatawan atau pertumbuhan 56,7 % dari tahun 2022 dalam RPJMD. Sementara dalam PK Perubahan target kunjungan tahun 2023 adalah 900.000. Sementara dalam Renstra target 1.000.000.000. Kunjungan wisatawan 2023 adalah 1.624.891, wisnus 1.305.318 dan wisman 319.573 wisatawan. Pertumbuhan wisatawan ditunjang banyak faktor seperti promosi dan peran serta pelaku dalam skema pentaheliks. Pertumbuhan mencapai 36,64 %.	Target indikator kinerja tercapai jika merujuk pada PK dan IKU Renstra
4.	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Hak Paten (HKI)	Terdapat 34 produk yang mendapat perlindungan HKI (hak paten dan merek dari rencana 64 produk dengan realisasi mencapai 53,12 %, sementara target 10 % . Sementara sudah terdapat 101 produk dari 11 sub sektor yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan HKI.	Target indikator tercapai dan melebihi target
5.	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Hak Paten (HKI)	Terdapat 11 sub sektor ekraf yang telah mendapat upaya perlindungan dari 16 sub sektor dengan realisasi mencapai 68,74 %. Penambahan produk yang difasilitasi hanya pada 11 sub sektor yaitu Sub sektor penerbitan, fotografi, film-video-anomasi, music, fashion, desain interior, kriya, desain produk, seni rupa, seni pertunjukkan dan kuliner.	Target indikator belum tercapai. Sub sektor yang belum adalah DKV, arsitek, TV radio, periklanan, aplikasi game, karena produknya belum mendapat fasilitasi HKI
6.	Peningkatan Cakupan Keterseediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahliannya (Tour Operator, Pemandu Wisata, Pelaku Ekraf, Restoran, Perhotelan, Pramuwisata, Transportasi)	Kegiatan sertifikasi kompetensi tidak dapat dijalankan dan data yang ada masih merupakan data lama yaitu menghasilkan 96 orang dan baru pada 2 jenis keahlian yaitu SDM pemandu wisata dan ekraf (arsitektur). Sementara ada 8 jenis keahlian yang menjadi target dengan jumlah 56 orang tersertifikasi di kawasan PE untuk 8 jenis keahlian (di 7 PE). Pencapaian untuk pemandu wisata dan atau pramuwisata 54,16 % dan untuk pelaku ekraf 16,66 % sementara untuk 5 jenis keahlian belum ada .	Target indikator kinerja belum tercapai karena anggaran yang direncanakan tidak dapat dicairkan karena kondisi keuangan daerah
7.	Peningkatan Cakupan POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate	Pokdarwis sudah ada di 19 Kabupaten yang Kawasan PE yaitu 6 kawasan PE terbangun dan 13 kawasan PE yang belum dibangun. Pencapaian 79,17 % dari target 100 %.	Target indikator kinerja belum tercapai
8.	Persentasi Pertumbuhan UMKM Baru di Pariwisata Estate (%)	Target Tahun 2022 sebesar 6 % dan realisasi mencapai 48,68 %. Ada penambahan 18 UMKM baru di Kawasan PE sehingga total dari tahun 2021 menjadi 55 UMKM baru.. Target tahun 2023 sebesar 8 % dan realisasi mencapai 25,45 %. Ada penambahan 14 UMKM baru di 14 lokasi PE.	Target indikator kinerja tercapai dan melebihi
9.	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	Target tahun 2023 4 hari, dan realisasi baru 2,01 hari. Data ini menggunakan data dari kabupaten/kota .	Target indikator kinerja belum tercapai.
10.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Jumlah kunjungan mencapai 1.624.891 orang wisatawan dan telah mencapai target yaitu 1.534.144 orang.	Target indikator kinerja tercapai.
10.	Peningkatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Aset	Target renstra Rp 1.000.000.000 dan target dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 2.850.599.967. Realisasi baru mencapai Rp 469.262.880 atau 16,46 %.	Target indikator kinerja tidak tercapai.

11.	Sertifikasi Tenaga Kependidikan Pariwisata	Target 300 orang tahun 2023, namun kegiatan tidak dapat dilakukan karena anggaran yang ada tidak dapat dicairkan, sehingga tidak ada penambahan tenaga sertifikasi yang dilakukan Dinas Parekraf NTT.	Target indikator kinerja tidak tercapai.
-----	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

Sumber: Hasil analisis, 2024

Pencapaian beberapa indikator di atas juga didukung melalui kemitraan yang dilaksanakan perangkat daerah lain atau pelaku pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya sejalan dengan kebijakan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan dengan pendekatan ekosistem pariwisata seperti kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan.

Untuk indikator kinerja pada RPJMD Perubahan, ada 2 (dua) indikator yang sudah tercapai dan 5 (lima) indikator yang belum tercapai. Sementara untuk indikator kinerja pada Renstra Perubahan, ada 2 (dua) indikator yang sudah tercapai dan 3 indikator yang belum tercapai.

3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Deselesaikan
1.	Pengembangan Investasi Pariwisata dalam rangka Peningkatan PAD	Renstra Perubahan Dinas Parekraf NTT 2018-2023	<p>Mewujudkan pembangunan pariwisata kolaboratif yang melibatkan semua sektor pendukung lintas pemangku kepentingan.</p> <p>Tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya Penilaian Aset / Apraisal lokasi Destinasi Wisata Pantai Lasiana, Kampung Seni Flobamorata Kupang dan 4 lokasi PE (Wolwal Alor, Praimadita Sumba Timur, Fatumnasi TTS) melalui anggaran perubahan APBD Kerjasama Kemitraan dan Pengelolaan Fasilitas Kawasan PE Terbangun dan kawasan wisata lainnya dengan pihak swasta yang profesional. Kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak sebanyak 4 (empat) kerjasama selama tahun 2023 <p>Kawasan PE terbangun dan kawasan wisata yang ada (dikelola) diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat terlibat dalam pengelolaan mendapatkan manfaat secara ekonomi. Bagi pemerintah Provinsi NTT mendapatkan peningkatan penerimaan untuk PAD.</p>
2.	Pembangunan Ekonomi Kreatif di Provinsi NTT	Renstra Perubahan Dinas Parekraf NTT 2018-2023	<p>Mewujudkan pembangunan dan pengembangan industri ekonomi kreatif yang sinergis dengan pembangunan kepariwisataan dan daerah</p> <p>Tindak lanjut:</p> <p>Penetapan Perda Nomor Tahun 2023 Tentang Perlindungan Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional yang sudah dirintis sejak tahun 2022.</p>

3.3. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Rekomendasi DPRD NTT terhadap pencapaian kinerja Dinas Parekraf NTT antara lain upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke NTT melalui kegiatan festival. Selanjutnya rekomendasi DPRD NTT dan tindak lanjutnya dapat dilihat dalam skema tabel berikut :

Tabel 20. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD NTT Tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
A	Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan sudah berjalan melalui pengembangan 7 (tujuh) destinasi pariwisata prioritas, akan tetapi hasil yang dicapai belum optimal		
1.	Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi di sekitar destinasi pariwisata perlu mendapat prioritas. Untuk itu perlu perangkat daerah perlu menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan yang lebih terarah dan luas.	<p>Tahun 2023 telah direncanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bagi masyarakat sekitar Kawasan PE melalui Program / Kegiatan:</p> <p>a. Program Peningkatan Daya Tarik Wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi / Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi. <i>Workshop pengembangan seni budaya, pentas musik dan Tari di Kabupaten TTS dan Ende.</i> <p>b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan / sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata <i>Penguatan Pokdarwis di PE Fatumnasi Kabupaten TTS dan PE Liman Kabupaten Kupang</i> Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan / sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata. <i>Sertifikasi kompetensi pekerja sektor restoran 50 orang dengan target peserta dari pekerja di hotel, restoran dan peserta potensial dari masyarakat sekitar Kawasan PE terdekat (Kupang, TTS dan Rote Ndao) yang sudah mendapat pelatihan dasar.</i> 	Peningkatan kapasitas pelaku jasa pariwisata dan ekonomi kreatif dari masyarakat di sekitar Kawasan Pariwisata Estate

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi / sub kegiatan Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif. <i>Sertifikasi kompetensi tenaga Barista 15 orang yang dilaksanakan di Kupang.</i> 	
2.	Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata perlu ditingkatkan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alokasi anggaran APBD tahun 2022 untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Rp 469.953.200 untuk 3 (tiga) Program yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Wisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI dan Program Pengembangan Sumber Daya Parekraf. ▪ Alokasi anggaran APBD tahun 2023 untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Rp 466.126.380 untuk 2 (dua) Program yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Wisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Parekraf. ▪ Upaya peningkatan alokasi anggaran sudah diupayakan pada saat usulan APBD 2023 namun terbentur dengan kondisi fiskal daerah. 	Peningkatan kapasitas pelaku jasa pariwisata dan ekonomi kreatif dari masyarakat di sekitar Kawasan Pariwisata Estate
B.	Sumbangan pariwisata terhadap perekonomian daerah masih terbatas		
1.	Atraksi wisata, terutama atraksi wisata interaktif yang membutuhkan keterlibatan langsung wisatawan perlu diversifikasi dan ditingkatkan kualitas atraksi dan layanannya. Dalam kaitan ini pengembangan kelompok-kelompok masyarakat pada kawasan pariwisata sebagai penyedia jasa atraksi sangat diperlukan	<p>Tindak lanjut yang dilakukan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan inventarisasi atraksi wisata yang ada di Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi NTT khususnya Kawasan PE yang sudah terbangun. ▪ Tahun 2023 melalui APBD telah direncanakan kegiatan peningkatan atraksi pertunjukan untuk meningkatkan daya tarik wisata melalui kegiatan <i>Workshop pengembangan seni budaya, pentas musik dan Tari di Kabupaten TTS dan Ende.</i> ▪ Tahun 2023, ada dukungan APBN melalui Dana Tugas Pembantuan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan atraksi wisata interaktif melalui Bimtek kapasitas penyelenggaraan kegiatan / event yang dilaksanakan di Alor untuk mendukung Visit Alor 2023. 	Upaya peningkatan kualitas daya tarik wisata / atraksi agar lama tinggal wisatawan bertambah
2.	Pertumbuhan UKM dan IKM pada kawasan pariwisata perlu didukung ketersediaan jaringan usaha yang mempertemukan sisi supply dan demand. Untuk itu pada setiap kawasan pariwisata perlu dibentuk Holding UKM dan IKM sebagai wadah bagi pengembangan produksi dan pemasaran produk UKM dan IKM. Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Parekraf NTT melakukan Kerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan perlindungan produk ekraf dari masyarakat sejak tahun 2021. ▪ Sejak tahun 2022 telah dilakukan fasilitasi produk ekraf masyarakat untuk proses HKI sebanyak 101 produk ekraf dan tahun 2023 sebanyak 21 produk ekraf. ▪ Tahun 2023 melalui APBD telah dihasilkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang 	Produk Ekraf dari UKM dan IKM semakin berkualitas dan dapat terserap di pasaran.

	(Provinsi/Kab/Kota) dapat menjalin kerjasama dengan Asosiasi Usaha terkait Kepariwisata untuk membentuk holding UKM dan IKM yang dimaksud.	Perlindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional yang menjadi payung upaya pengembangan industri ekonomi kreatif di NTT termasuk mengembangkan UKM dan IKM di Destinasi Wisata.	
C.	Laporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata melalui 4 Program ditemukan indikator kinerja program tidak sesuai dengan indikator yang terdapat di dalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023		
1.	Gubernur perlu memberi perhatian khusus terhadap Pimpinan Perangkat Daerah, sehingga dapat bertindak cermat dalam penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi Kewenangannya	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NT telah menyempurnakan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah agar indikator Program sesuai dengan RPJMD Perubahan dalam dokumen LKPJ Dinas Parekraf NTT 2022 dan LKIP Dinas Parekraf NTT 2022 yang disampaikan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT pada Februari 2023.	Perbaiki Laporan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah bidang Pariwisata
2.	Indikator kinerja program yang digunakan untuk menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata adalah indikator sebagaimana tercantum didalam RPJMD NTT Perubahan Tahun 2018-2023, Bab VI atau Bab VII	Hasil realisasi kinerja Dinas Parekraf NTT melalui 4 Program dengan indikator program yang ada sudah sesuai dengan indikator program yang tercantum dalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023 yang disajikan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LKPJ Dinas Parekraf NTT Tahun 2022 pada halaman 29, bagian 3.1.3. analisis kesesuaian pencapaian kinerja, tabel 18. Kondisi Capaian Kinerja Dinas Parekraf NTT dalam RPJMD Perubahan 2018-2023. ▪ Dokumen LKIP Dinas Parekraf NTT Tahun 2022 pada halaman 18, tabel II.2. Target dan Realisasi Indikator Program dalam RPJMD 	Perbaiki Laporan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah bidang Pariwisata

Sumber: Hasil olahan ,2024

4. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuan / Dekonsentrasi

Total anggaran Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2023 untuk Provinsi NTT sebesar Rp 1.385.000.000 sesuai DIPA Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor SP DIPA - 040.01.4.640030/2023 tanggal 30 November 2022 pada Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (4 Kegiatan) dan Program Dukungan Manajemen (1 kegiatan).

Tabel 21. Realisasi Program dan Kegiatan APBN TA 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian
1.	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif			
	a. Pengembangan sumber daya manusia Pariwisata	87.500.000	87.429.200	Bimbingan teknis Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan dilaksanakan di Kupang 17 Juni 2023 dengan 45 peserta.
	b. Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif	87.500.000	87.429.200	Bimbingan teknis Penngkatan Kapasitas Ekraf di NTT. Dilaksanakan di Hotel Harper Kupang 31 Juli 2023 dengan 40 peserta
	c. Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	600.000.000	585.787.125	Pengembangan Sistem informasi kepariwisataan nasional. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Bimtek dan pengumpulan data di 22 kabupaten/kota. Bimtek Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Berbasis Data dilakukan di Hotel Neo Aston Kupang tgl. 30-31 Agustus 2023 dengan 40 peserta, yang berasal dari pengelola daya Tarik wisata, akomodasi dan Jasa Makanan/minuman. Pengumpulan data kepariwisataan dilakukan oleh tim surveyor yang dibentuk dan diawali dengan kegiatan Workshop Pemahaman Indikator dan Pengisian Data Keparekraf tgl 1 September 2023 di Hotel Neo Aston Kupang dan diikuti 40 peserta. Tim surveyor sendiri terdiri dari 20 orang.
	d. Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (event)	500.000.000	498.911.800	Bimtek kapasitas penyelenggaraan kegiatan / event dilakukan 2 kali. Kegiatan dilaksanakan di Alor 13-17 Juni 2023. Untuk mendukung Visit Alor 2023
2.	Program Dukungan Manajemen			
	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	110.000.000	109.986.250	Perencanaan, koordinasi, laporan pertanggungjawaban
	Total	1.385.000.000	1.369.479.021	

Sumber: Olahan , 2024

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dana Tugas Pembantuan tahun 2023 adalah realisasi keuangan sebesar Rp 1.369.479.021 atau 98,88 % dan ada sisa anggaran sebesar Rp 15.520.979.

4.2. Hambatan / Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

1. Permasalahan

Permasalahan yang ada terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan mengingat NTT adalah provinsi kepulauan sehingga biaya transportasi antar daerah sangat tinggi.

a. Peserta Pelatihan

Kegiatan pelatihan belum menjangkau peserta dari seluruh kabupaten /kota yang ada karena keterbatasan dukungan anggaran. Beberapa peserta dari kabupaten di luar Kupang tidak dapat hadir memenuhi undangan kegiatan karena tidak ada dana transportasi ke Kupang yang menjadi lokasi kegiatan. Dukungan anggaran untuk peserta hanya akomodasi dan makan minum selama kegiatan.

b. Pelatihan secara Daring

Pelatihan secara daring masih menyisakan masalah yaitu kualitas penyerapan dari peserta. Penyampaian materi berkurang kualitasnya karena sering terdapat gangguan jaringan dan lainnya. Peserta tidak banyak menerima manfaat dari penyampaian materi secara online.

c. Durasi Pelatihan

Durasi pelatihan yang singkat membuat peserta kesulitan menerima materi dengan baik dan materi yang disampaikan lebih banyak teoritis dan tidak ada praktek.

2. Solusi

Terhadap permasalahan ini maka telah diambil langkah dan solusi dan juga saran untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya sebagai berikut:

- a. Peserta pelatihan yang tidak hadir digantikan dengan peserta ASN dari Kota Kupang dan kabupaten terdekat seperti Kabupaten Kupang dan kabupaten di daratan Pulau Timor. Hal ini dilakukan agar kuota peserta pelatihan tetap terpenuhi.
- b. Pelatihan dapat dilakukan di luar kota Kupang seperti di salah satu kota di kabupaten di Flores untuk mengakomodir peserta dari kabupaten se-daratan Flores atau salah satu kota di Pulau Sumba untuk mengakomodir peserta dari kabupaten se-daratan Sumba.
- c. Kombinasi pelatihan dapat dilakukan dengan metode hybrid (secara daring dan luring) dengan pelaksanaan praktek secara luring/offline untuk kegiatan yang bersifat workshop dan bimtek. Durasi kegiatan efektif minimal 2 (dua) hari.

5. PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023. Diharapkan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu menjadi energi pendorong pembangunan daerah NTT di masa yang akan datang.

Kupang, 15 Januari 2024



Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

JONI LIE ROHI LODO, S.H

Pembina Tk. I / IV b

NIP 196707171993031016

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Parekraf	
Fungsional Perencana Ahli Madya	

Referensi:

1. RPJMD Perubahan NTT 2018-2023.
2. Renstra Perubahan Dinas Parekraf Provinsi NTT 2018-2023.
3. Laporan Bulanan Dinas Parekraf NTT Januari- Desember 2023.
4. Laporan Evaluasi Bidang / Sekretariat Dinas Parekraf NTT TA 2023

Lampiran 1. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

Row Labels	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran
5.1.01.01.01.0001.			
Belanja Gaji Pokok PNS	3,901,166,612	3,779,022,416	122,144,196
5.1.01.01.01.0002.			
Belanja Gaji Pokok PPPK	-	-	-
5.1.01.01.02.0001.			
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	369,819,506	359,674,396	10,145,110
5.1.01.01.02.0002.			
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	-	-	-
5.1.01.01.03.0001.			
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	247,100,000	209,300,000	37,800,000
5.1.01.01.04.0001.			
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	218,820,000	16,800,000	202,020,000
5.1.01.01.05.0001.			
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	161,007,000	156,260,000	4,747,000
5.1.01.01.05.0002.			
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-	-	-
5.1.01.01.06.0001.			
Belanja Tunjangan Beras PNS	343,597,758	317,964,300	25,633,458
5.1.01.01.06.0002.			
Belanja Tunjangan Beras PPPK	-	-	-
5.1.01.01.07.0001.			
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5,275,536	5,099,975	175,561
5.1.01.01.08.0001.			
Belanja Pembulatan Gaji PNS	758,997	53,848	705,149
5.1.01.01.08.0002.			
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	-	-	-
5.1.01.01.09.0001.			
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	219,778,284	154,998,834	64,779,450
5.1.01.01.09.0002.			
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	-	-	-
5.1.01.01.10.0001.			
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8,025,252	9,075,775	(1,050,523)
5.1.01.01.10.0002.			
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	-	-	-
5.1.01.01.11.0001.			
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24,075,768	22,034,114	2,041,654
5.1.01.01.11.0002.			
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	-	-	-
5.1.01.01.12.0001.			
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	16,719,288	-	16,719,288
5.1.01.01.12.0002.			
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	-	-	-
5.1.01.02.01.0001.			
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	515,184,895	511,710,378	3,474,517
5.1.01.02.05.0001.			
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	719,608,104	717,731,365	1,876,739
5.1.01.03.02.0014.			
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	15,000,000	10,196,451	4,803,549
5.1.01.03.07.0001.			
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	46,440,000	46,440,000	-
5.1.02.01.01.0004.			
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15,050,000	15,027,125	22,875
5.1.02.01.01.0016.			
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	171,000	-	171,000
5.1.02.01.01.0024.			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	55,689,920	34,461,850	21,228,070
5.1.02.01.01.0025.			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	285,200	285,000	200
5.1.02.01.01.0026.			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	51,058,580	21,698,100	29,360,480
5.1.02.01.01.0027.			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-
5.1.02.01.01.0030.			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4,999,800	4,900,316	99,484
5.1.02.01.01.0036.			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	581,400	-	581,400
5.1.02.01.01.0039.			
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	41,040,000	-	41,040,000
5.1.02.01.01.0052.			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127,462,200	43,733,208	83,728,992
5.1.02.02.01.0001.			
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	15,250,000	6,100,000	9,150,000
5.1.02.02.01.0003.			
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31,300,000	-	31,300,000
5.1.02.02.01.0004.			
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31,800,000	31,800,000	-
5.1.02.02.01.0006.			
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4,800,000	-	4,800,000
5.1.02.02.01.0011.			
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	59,000,000	-	59,000,000
5.1.02.02.01.0028.			

Row Labels	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	950,400,000	916,800,000	33,600,000
5.1.02.02.01.0029.			
Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-
5.1.02.02.01.0036.			
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33,000,000	33,000,000	-
5.1.02.02.01.0042.			
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2,835,000	2,835,000	-
5.1.02.02.01.0046.			
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2,100,000	899,100	1,200,900
5.1.02.02.01.0061.			
Belanja Tagihan Listrik	141,455,000	140,988,344	466,656
5.1.02.02.01.0063.			
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,335,000	1,306,000	29,000
5.1.02.02.01.0064.			
Belanja Paket/Pengiriman	6,751,800	6,750,000	1,800
5.1.02.02.01.0067.			
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8,600,000	3,000,000	5,600,000
5.1.02.02.01.0071.			
Belanja Lembur	140,263,000	134,365,000	5,898,000
5.1.02.02.02.0005.			
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	38,016,000	36,480,000	1,536,000
5.1.02.02.02.0006.			
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,280,960	2,267,920	13,040
5.1.02.02.02.0007.			
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2,851,200	2,782,031	69,169
5.1.02.02.04.0036.			
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	15,235,700	5,700,000	9,535,700
5.1.02.02.04.0049.			
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2,082,600	-	2,082,600
5.1.02.02.04.0117.			
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-
5.1.02.02.04.0132.			
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	13,000,000	10,000,000	3,000,000
5.1.02.02.05.0009.			
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30,000,000	-	30,000,000
5.1.02.02.09.0020.			
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	91,000,000	90,500,000	500,000
5.1.02.02.12.0002.			
Belanja Sosialisasi	31,400,000	-	31,400,000
5.1.02.03.02.0035.			
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37,980,000	37,947,983	32,017
5.1.02.03.03.0001.			
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30,000,000	29,968,800	31,200
5.1.02.04.01.0001.			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	682,080,800	333,698,650	348,382,150
5.1.02.04.01.0003.			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,600,000	-	1,600,000
5.1.02.05.02.0001.			
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1,005,879,600	60,500,000	945,379,600
5.1.02.05.02.0002.			
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	-	-	-
Grand Total	10,521,011,760	8,324,156,279	2,196,855,481



DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Frans Seda No. 72 Kupang – NTT
Telp (0380) 826384 Fax (0380) 826384

parekrafntt.id Dinas Pariwisata Provinsi NTT @disparekraf.ntt @disparekrafNTT Dinas Parekraf NTT

